

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA
PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA**

Dhaful Oktaviatul Rokmah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dhafuloktavia@gmail.com

I Made Suparta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
madesuparta@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Poverty remains one of the development issues that continues to receive attention from local governments, including the Government of Surabaya City. Efforts to reduce poverty can be undertaken through enhancing economic growth and optimizing government expenditure. This study aims to analyze the effect of economic growth and government expenditure on poverty in Surabaya City during the period 2011–2025. This study employs secondary data in the form of annual time series data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Surabaya City and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB). The analytical method used is the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, followed by the Error Correction Model (ECM) to examine both short-run and long-run relationships among the variables. The results indicate that economic growth and government expenditure simultaneously have a significant effect on poverty in Surabaya City. In the short run, economic growth has a negative and significant effect on poverty, whereas government expenditure does not have a significant effect on poverty. The cointegration test results reveal the existence of a long-run relationship among economic growth, government expenditure, and poverty. These findings suggest that economic growth plays an important role in reducing poverty, while the effectiveness of government expenditure in alleviating poverty still requires better management and more targeted budget allocation.

Keywords: *Economic Growth, Government Expenditure, Poverty, ARDL, ECM, Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, yang meliputi konsumsi makanan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan non-makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sandang, dan berbagai barang maupun jasa lainnya. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan menjadi peran utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Surabaya sebagai salah satu pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun

demikian, permasalahan kemiskinan masih menjadi hambatan yang membutuhkan perhatian. Meskipun jumlah penduduk miskin cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Surabaya masih mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pembangunan ekonomi yang berlangsung belum mampu menghasilkan distribusi manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Secara umum, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya penghasilan yang diterima masyarakat. Lebih dari itu, kemiskinan juga menggambarkan sulitnya masyarakat menjangkau berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial yang berperan dalam menunjang kesejahteraan. Dengan demikian, tingkat kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Keberadaan kemiskinan yang masih berfluktuasi menandakan perlunya upaya lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menandakan pembangunan yang inklusif.

Tabel 1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin Di Kota Surabaya Tahun 2011-2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumla Penduduk Miakin (Ribu Jiwa)	%
2011	310.074,00	183,3	6,58
2012	339.208,00	175,7	6,23
2013	372.511,00	169,4	6,00
2014	393.151,00	164,4	5,79
2015	418.930,00	165,72	5,82
2016	438.283,00	161,01	5,63
2017	474.365,00	154,71	5,39
2018	530.178,00	140,81	4,88
2019	567.474,00	130,55	4,51
2020	592.137,00	145,67	5,02
2021	611.466,00	152,49	5,23
2022	652.540,00	138,21	4,72
2023	718.370,00	136,37	4,65
2024	742.678,00	116,62	3,96
2025	775.597,00	109,09	3,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, kemiskinan selama periode 2011–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Penurunan tingkat kemiskinan pada sebagian besar periode mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tahun 2020–2021 tingkat kemiskinan

mengalami peningkatan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya angka pengangguran. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka terendah sebesar 3,56 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, fluktuasi tingkat kemiskinan yang masih terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan belum sepenuhnya dapat diatasi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan peluang kerja yang lebih luas serta meningkatkan taraf penghasilan masyarakat, serta memperluas aktivitas ekonomi sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya pengurangan kemiskinan. Belanja pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program jaminan sosial, pemerintah diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup penduduk sekaligus menekan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Surabaya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Menurut Mukti Bagus Prayoga (2019) Kemiskinan sering kali dipahami sebagai kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pada kenyataannya kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki cakupan sangat luas dan bersifat multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek dunia pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan sumber daya, serta taraf hidup masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga terkait untuk menekan angka kemiskinan, namun jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat dari waktu ke waktu.

Kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, karena kebutuhan manusia yang beragam menyebabkan kemiskinan tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, dalam praktiknya kemiskinan sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena lebih mudah diamati dan diukur secara kuantitatif, tetapi kemiskinan juga berkaitan dengan aspek lain seperti sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya, dan aspek kelamin. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan seharusnya dilakukan secara multidimensi agar pembuatan kebijakan

penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, menyeluruh, dan berkelanjutan (Fadilah et al., 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) pendekatan ini menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok masyarakat secara efisien untuk memenuhi dalam mencukupi kebutuhan pokoknya secara layak. Kebutuhan tersebut mencakup dua jenis, yaitu kebutuhan pangan dan kebutuhan nonpangan. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, sebuah komunitas dikelompokkan ke dalam penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya kurang dari garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa yang tercermin dari meningkatnya output secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu indikator utama pembangunan, digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah maupun negara. Ini karena pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu wilayah, diperlukan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi yang umumnya dilakukan dalam periode tahunan sehingga dapat menggambarkan perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu (BPS, 2025).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat dibedakan menjadi dua menurut (Liana et al, 2024) pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek cenderung dipengaruhi oleh perubahan siklus bisnis, tingkat konsumsi masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang bersifat sementara. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti peningkatan investasi, kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan per kapita, pemerataan hasil pembangunan, dan terciptanya stabilitas ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam menciptakan perekonomian yang berkelanjutan sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan dalam jangka panjang (Rambe & Purmini, 2020).

Belanja Pemerintah

Menurut Wibowo (2014), Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa memerlukan alokasi dana, sehingga Seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan termasuk dalam pengeluaran pemerintah tersebut Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran kas daerah dalam satu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi tanggungan atau beban daerah (DJPK, 2000).

Menurut Fasholla (2018), Belanja daerah menjadi kewajiban pemerintah daerah yang menyebabkan pengurangan kekayaan bersih. Istilah belanja muncul dalam laporan realisasi anggaran karena basis kas masih digunakan. Pengelompokan belanja dilakukan melalui tiga klasifikasi: ekonomi (berdasarkan jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Adapun klasifikasi ekonomi berarti proses menggolongkan pengeluaran menurut jenis pengeluaran yang timbul dari suatu kegiatan. Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikelompokkan ke dalam lima jenis belanja, yaitu sebagai berikut:

Belanja Administrasi umum yaitu seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.

1. Belanja Operasional, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik yaitu seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan penyediaan layanan publik, termasuk pemeliharaan fasilitas umum.
2. Belanja modal yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membeli atau menambah aset yang bertahan lebih dari satu tahun anggaran. Belanja ini bertujuan meningkatkan aset atau kekayaan daerah dan dapat menimbulkan konsekuensi berupa biaya operasional serta pemeliharaan pada periode berikutnya.
3. Belanja Transfer yaitu pemerintah daerah menyalurkan dana kepada pihak lain dalam bentuk pengeluaran tertentu. Pihak penerima tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi, manfaat ekonomi, maupun mengembalikan dana tersebut secara langsung kepada pemerintah daerah.
4. Belanja Tak Tersangka yaitu pengeluaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk penanganan keadaan darurat, bencana, dan berbagai kejadian luar biasa lainnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evita & Ramadhan, 2022), (Rossa & Ananda, 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan (Guampe et al., 2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sementara (Padeta et al., 2019), (Prayoga, 2019), (Izzati, 2018) dan (Ningsih & Anindya, 2018) menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Prayoga, 2019) menunjukkan belanja pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan (Evita & Ramadhan, 2022) dan (Mun et al., 2022) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan (Padeta et al., 2019) positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. sedangkan (Izzati, 2018) belanja pemerintah berpengaruh negatif tidak signifikan.

C. METODE PENELITIAN

Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis ARDL (Autoregressive Distributed Lag), yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta besarnya pengaruh antar variabel penelitian. Data

yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series selama periode 2011–2025. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik data runtut waktu agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan antar variabel dalam periode tersebut. Perangkat lunak EViews digunakan untuk mengolah data. Sebelum dilakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas data menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test untuk mengetahui tingkat stasioneritas masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan penentuan lag optimal untuk memperoleh panjang lag terbaik yang akan digunakan dalam model.

Setelah lag optimal diperoleh, dilakukan estimasi model ARDL. Tahap berikutnya adalah uji kointegrasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang antar variabel penelitian. Hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara variable pertumbuhan ekonomi, variable belanja pemerintah, dan varaibel kemiskinan. Oleh karena itu, analisis dilanjutkan menggunakan Error Correction Model (ECM) untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek serta kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka Panjang.

$$\Delta KM_t = \alpha + \beta_1 \Delta PE_t + \beta_2 \Delta BP_t + \lambda ECT_{t-1} + \varepsilon_t$$

Ketetrangan:

ΔKM = Perubahan tingkat kemiskinan

ΔPE = Perubahan pertumbuhan ekonomi

ΔBP = Perubahan belanja pemerintah

ECT = Error Correction Term

B_1, β_2 = Koefisien Regresi

α = Konstanta

λ = Koefisien penyesuaian

ε = Error term

t = Periode Berjalan

$t-1$ = Periode Sebelumnya (lag 1)

Hasil

Uji Stsioner

Tabel 2 Hasil Uji Stasioner

Variabel	Unit Root	ADF Test	Critical Value	Prob.	Keterangan
Y (Kemiskinan)	First Difference	-3.757493	-3.212696	0.0222	Stasioner
PE (Pertumbuhan Ekonomi)	First Difference	-4.955641	-3.119910	0.0022	Stasioner
BP (Belanja Pemerintah)	First Difference	-5.175881	-3.144920	0.0019	Stasioner

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 2, variabel kemiskinan (Y) pada tingkat *level* memiliki nilai ADF sebesar -0,253801 dengan probabilitas 0,9097 ($> 0,05$) sehingga tidak stasioner. Setelah dilakukan *first difference*, nilai ADF menjadi -3,757493 dengan probabilitas 0,0222 ($< 0,05$) sehingga dinyatakan stasioner. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) pada tingkat *level* memiliki nilai ADF sebesar -3,038548 dengan probabilitas 0,0555 ($> 0,05$) sehingga tidak stasioner, dan menjadi stasioner pada *first difference* dengan nilai ADF -4,955641 dan probabilitas 0,0022 ($< 0,05$). Sementara itu, variabel belanja pemerintah (BP) telah stasioner pada tingkat *level* dengan nilai ADF -4,018347 dan probabilitas 0,0098 ($< 0,05$). Dengan demikian, secara keseluruhan seluruh variabel stasioner pada tingkat *first difference*, sehingga metode ARDL layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Kointegrasi Pendekatan Johansen Test

Tabel 3 Uji Kointegrasi Pendekatan Johansen Test

Unrestricted
Cointegration
Rank Test
(Trace)

Hypothesized		Trace	0.05	Prob.**
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Critical Value
None *	0.871972	42.70638	29.79707	0.0010
At most 1 *	0.707590	15.98482	15.49471	0.0422
At most 2	3.68E-06	4.79E-05	3.841465	0.9960

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji kointegrasi pada Tabel 3 menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, pada hipotesis None, nilai Trace Statistic (42,70638) terbukti lebih tinggi dari critical value (29,79707) dengan probabilitas 0,0010 yang signifikan (di bawah 0,05). Ini berarti hipotesis nol ditolak dan disimpulkan bahwa variabel-variabel memiliki hubungan kointegrasi. Kedua, pada hipotesis At most 1, Trace Statistic sebesar 15,98482 juga masih melebihi critical value 15,49471 dengan probabilitas 0,0422 ($< 0,05$). Hasil ini kembali menegaskan adanya kointegrasi pada taraf 5%. Ketiga, pada hipotesis At most 2, nilai Trace Statistic hanya 0,0000479, jauh di bawah critical value 3,841465, dengan probabilitas 0,9960 yang tidak signifikan ($> 0,05$). Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kointegrasi tambahan yang ditemukan pada hipotesis tersebut.

Uji Kointegrasi Pendekatan Bond Test

Tabel 3 Hasil Uji Kointegrasi Pendekatan Bond Test

Bounds Test

Test Statistic						Value	
F-statistic						18.967087	
Bounds Critical Values							
10%			5%		1%		
Sample Size	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)	
30	2.915	3.695	3.538	4.428	5.155	6.265	
Asymptotic	2.630	3.350	3.100	3.870	4.130	5.000	

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji Tabel 4.6 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 18,967087. Pada tingkat signifikansi 5%, nilai kritis batas atas I(1) adalah 4,428. Dengan membandingkan keduanya, diketahui bahwa F-statistik (18,967) berada di atas I(1) (4,428). Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol yang mengasumsikan tidak adanya hubungan jangka panjang harus ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kointegrasi atau hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Dengan demikian, model ECM dalam penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap estimasi jangka pendek dan jangka panjang.

Penentuan Lag Optimum

Tabel 4 Hasil Penentuan Lag Optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-95.54595	NA	261.1495	14.07799	14.21493	14.06532
		50.71052	6.222043	10.29266	10.84042	10.24195
1	-60.04859	*	*	*	*	*

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

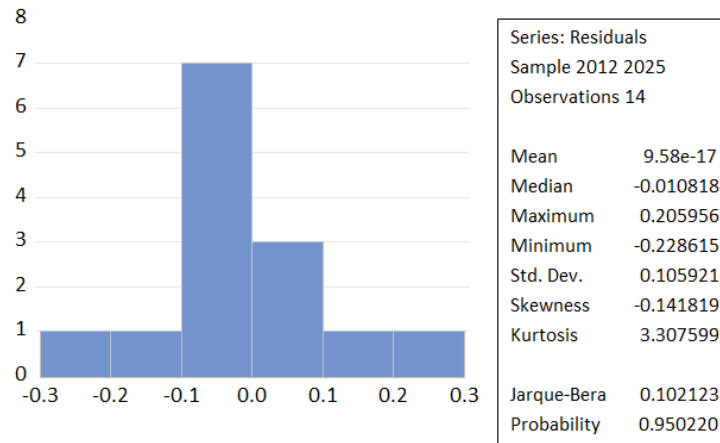
Berdasarkan Tabel 4. nilai AIC pada lag 0 sebesar 14,07799, sedangkan pada lag 1 nilai AIC sebesar 10,29266. Karena nilai AIC pada lag 1 lebih kecil dibandingkan lag 0, maka lag 1 dipilih sebagai lag optimum dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, model ECM yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan lag 1 pada seluruh variabel, yang berarti bahwa kemiskinan tahun ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah tahun

sebelumnya (lag 1).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Jika Pvalue > 0,05 maka asumsi normal terpenuhi



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Dari uji normalitas yang dilakukan, diperoleh p-value 0,950. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05, yang berarti residual model regresi berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, model regresi ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag

F-statistic	2.026202	Prob. F(1,7)	0.1976
Obs*R-squared	3.142720	Prob. Chi-Square(1)	0.0763

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic (0,1976) maupun Obs*R-squared (0,0763) keduanya masih berada di atas 0,05. Karena itu, keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis nol, yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model ARDL penelitian ini. Model pun dinyatakan lolos uji dan dapat dipakai untuk analisis selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.154150	Prob. F(5,8)	0.9728
Obs*R-squared	1.230279	Prob. Chi-Square(5)	0.9419
Scaled explained SS	0.463509	Prob. Chi-Square(5)	0.9934

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa ketiga nilai probabilitas yang dihasilkan, yaitu F-statistic (0,9728), Obs*R-squared (0,9419), dan Scaled explained SS (0,9934), semuanya lebih besar dari 0,05. Karena itu, keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis nol yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini menandakan bahwa model ECM pada penelitian ini memiliki varians residual yang konstan (homoskedastisitas) dan bebas dari masalah heteroskedastisitas, sehingga model dinyatakan lolos uji dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Uji Multikolinearitas

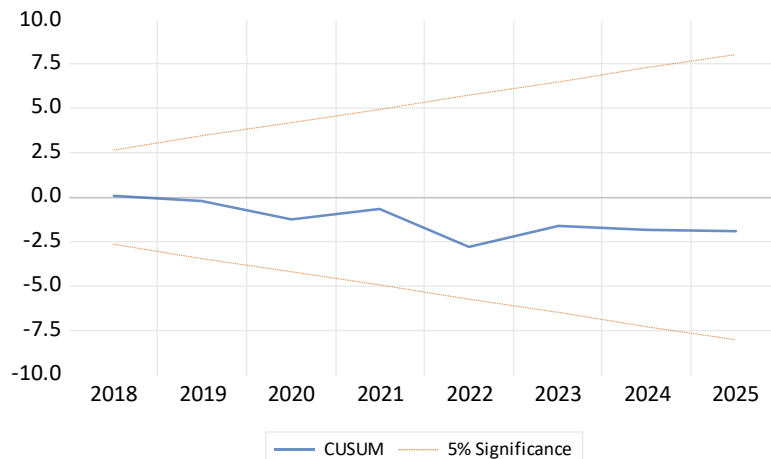
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factors
Date: 06/17/26 Time: 20:09
Sample: 2011 2025
Included observations: 14

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Y(-1)	0.004579	101.1126	1.772337
PE	0.000411	11.91638	2.731971
PE(-1)	0.000598	17.88329	4.064290
BP	8.45E-05	9.476822	5.412736
BP(-1)	6.34E-05	7.107330	4.070203
C	0.133271	102.3394	NA

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai VIF tertinggi dimiliki oleh variabel Belanja Pemerintah (5,412736), sedangkan nilai VIF terendah dimiliki oleh variabel lag kemiskinan (1,772337). Semua nilai VIF yang dihasilkan berada di bawah 10, yang berarti tidak ada korelasi kuat antar variabel bebas. Dengan demikian, setiap variabel independen dapat menjadi prediktor yang berdiri sendiri tanpa adanya tumpang tindih informasi. Kesimpulannya, model regresi ini bebas dari multikolinearitas dan hasil estimasinya layak untuk diinterpretasikan.

Uji Stabilitas CUSUM



Gambar 2 Uji Stabilitas CUSUM

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Gambar 4.4, garis CUSUM (biru) berada di dalam batas signifikansi 5% (garis merah putus-putus) sepanjang periode pengamatan. Oleh sebab itu, menunjukkan bahwa parameter model ARDL dalam penelitian ini bersifat stabil dan tidak mengalami perubahan struktural yang signifikan. Oleh karena itu, model yang digunakan layak untuk analisis lebih lanjut dan hasil estimasi dapat diinterpretasikan.

Estimasi Jangka Pendek

Tabel 7 Estimasi ECM Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CointEq(-1)*	-0.147656	0.014457	10.21367	0.0000
D(PE)	-0.087096	0.013079	-6.659407	0.0000
D(BP)	0.004213	0.003170	1.328873	0.2108

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12, persamaan jangka pendek yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_t = -0,087\Delta PE_t + 0,004\Delta BP_t - 0,147ECT_{t-1}$$

Interpretasi dari hasil estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (D(PE)) memiliki koefisien sebesar - 0,087096 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$). Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka pendek. Jika pertumbuhan ekonomi naik 1%, kemiskinan akan turun 0,087%.
2. Variabel Belanja Pemerintah (D(BP)) memiliki koefisien sebesar 0,004213 dengan nilai probabilitas 0,2108 ($> 0,05$). Yang berarti dalam jangka

pendek, belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Error Correction Term (CointEq(-1)) memiliki koefisien sebesar -0,147656 dengan nilai probabilitas 0,0000 (< 0,05). Koefisien ECT yang negatif dan signifikan mengindikasikan adanya mekanisme koreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Nilai ECT sebesar -0,147656 berarti bahwa sekitar 14,8 persen dari ketidakseimbangan yang terjadi pada kemiskinan akan terkoreksi dalam satu tahun menuju keseimbangan jangka Panjang.

Estimasi Jangka Panjang

Tabel 9 Estimasi ECM Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	1.153419	0.635168	1.815926	0.0967
BP	-0.189555	0.166781	-1.136550	0.2799
C	1.998435	1.634371	1.222755	0.2470

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 9, persamaan jangka panjang yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,998 + 1,153 \text{ PE} - 0,190 \text{ BP}$$

Interpretasi dari hasil estimasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki koefisien sebesar 1,153419 dengan nilai probabilitas 0,0967 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya pada tingkat signifikansi 5%. Meskipun demikian, koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan, namun secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan.
2. Variabel Belanja Pemerintah (BP) memiliki koefisien sebesar -0,189555 dengan nilai probabilitas 0,2799 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien yang negatif mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah cenderung menurunkan kemiskinan, namun secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan.
3. Konstanta (C) bernilai 1,998435, yang berarti apabila variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah bernilai nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 1,998 persen.

Uji Wald Test

Tabel 10 Hasil Uji Wald Test

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	161.1536	(2, 8)	0.0000
Chi-square	322.3071	2	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 4.14, diperoleh nilai F-statistic sebesar 161,1536 dengan nilai probabilitas 0,0000, dan nilai Chi-square sebesar 322,3071 dengan nilai probabilitas 0,0000. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, secara simultan (bersama-sama), variabel pertumbuhan ekonomi (PE) dan belanja pemerintah (BP) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) di Kota Surabaya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara simultan atau bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah secara bersama-sama berperan penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di Kota Surabaya. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pengelolaan belanja pemerintah yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan jika hanya mengandalkan salah satu variabel saja.

Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini mendukung teori ekonomi klasik bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan penghasilan masyarakat.

Namun demikian, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Kondisi ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya bersifat inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu atau sektor-sektor tertentu saja, sementara masyarakat miskin masih mengalami kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi yang tercipta.

Dalam jangka pendek, belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah dalam jangka pendek belum mampu menurunkan kemiskinan

secara signifikan. Penyebabnya antara lain karena belanja pemerintah yang dialokasikan belum tepat sasaran atau masih didominasi oleh belanja administrasi dan belanja pegawai, bukan belanja modal atau belanja sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan Masyarakat.

Dalam jangka panjang, belanja pemerintah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun arah pengaruhnya negatif. Artinya, peningkatan belanja pemerintah cenderung diikuti oleh penurunan kemiskinan, namun secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis peningkatan belanja pemerintah seharusnya mampu menurunkan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan program perlindungan sosial, namun dalam praktiknya di Kota Surabaya dampak tersebut belum terlihat secara signifikan dalam jangka Panjang

D. KESIMPULAN

Analisis dan pembahasan yang telah disajikan memberikan landasan untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat.
2. Belanja pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, yang kemungkinan disebabkan oleh alokasi belanja yang belum secara optimal diarahkan pada program pengentasan kemiskinan.
3. Hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah dalam jangka panjang akan memengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Surabaya.
4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kota Surabaya selama periode penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, Kota Surabaya (2025). Profil Kemiskinan di Kota Bekasi Maret 2025. *Berita Resmi Statistik*, XXV(42/07/18), 1–12.
- BPS Kota Surabaya. (2025). Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2024. *Bps.Go.Id*, 10(32), 114–122.
- DJPk. (2000). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000*. 1969(1), 1–24.
- Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Pemerintah Terhadap kemiskinan Di Kabupaten Blora. *EKOMBIS REVIEW*:

- Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 79–88.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1998>
- Fadilah, N., Dwi, A. S., & Sukiman. (2016). Analisi pengaruh pendapatan per kapita, tingkat penaguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 11(01), 18–26.
- Fasholla, R. T. (2018). Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Cilacap. *Dspace UII*, 2016, 1–19.
- Guampe, F. A., Walenta, A. S., & Kawani, F. B. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2001-2021. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 92–102.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v6i1.5536>
- Izzati, N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Tabalong. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 27–37.
- Mas'udin. (2017). *Peran Belanja Pemerintah Pusat Dalam Pengangguran Kemiskinan Di Indonesia*. 1(2), 1–19.
- Mun, H. W., Hook, L. S., Niaz Ahmad, M. N., & Mazlan, N. S. (2022). Does Recomposed Institutions Quality Alleviate Extreme Income Inequality? *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(2), 1–16.
<https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5602-1>
- Nansadiqa. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *HEI EMA*, 3(1), 70–80.
- Prayoga. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003 – 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Rambe, R. A., & Purmini. (2020). *Kemampuan belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan: bukti empiris dari sumatera dan jawa*. 2(1), 1–15.
- Rossa, A., Ananda, C. F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Bosial, dan belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan. *Jdess 03.03.2024*, 3(3), 803–813.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Wibowo, mohamad erhan. (2014). Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*, 1–85(1), 1–85.
- Yolanda Pateda, Vecky A.J. Masinambouw, T. O. R. (2019). Pengaruh Investasi. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–17.